

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kalimantan Barat merupakan sebuah Provinsi bagian Republik Indonesia yang terletak di bagian barat pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 Kabupaten Kota di antaranya Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Kubu Raya, Kota Singkawang dan Kota Pontianak. Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat yang secara geografis dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0 derajat) dan pengaruh letak ini pula Kalimantan Barat adalah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta mempunyai kelembapan yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Batas-batas daerah provinsi Kalimantan Barat meliputi Serawak (Malaysia Timur) berada di utara, laut Jawa berada di selatan, Kalimantan Tengah berada di timur, laut Natuna dan Selat Karimata berada di barat Kalimantan Barat.

Daerah provinsi Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1953 berdasarkan UU Darurat No 2 Tahun 1953 yang mulai berlaku dari tanggal 7 Januari 1953

yang menyatakan bahwa Daerah Provinsi Kalimantan yang bersifat administratif dan kemudian dibentuk sebagai Daerah Otonom Provinsi Kalimantan yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Sejarah mencatat bahwa Kalimantan Barat sebelum terbentuknya Provinsi Kalimantan Barat merupakan sebuah Daerah Istimewa dalam Republik Indonesia Serikat yang terbentuk pada tanggal 22 Oktober 1946 berdasarkan putusan gabungan Kerajaan yang ada di Borneo Barat kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Dewan Borneo.

Keputusan gabungan Para Raja atau Sultan di Kalimantan Barat tersebut kemudian mewujudkan suatu ikatan federasi dengan nama “Daerah Istimewa Kalimantan Barat”. Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibagi dalam 12 Swapraja (pemerintahan sendiri) dan 3 Neo Swapraja, yakni 1. Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Sekadau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang dan Neo Swapraja, yaitu 1 Neo Swapraja Meliau, Neo Swapraja Nanga Pinoh, Neo Swapraja Putussibau. (Turiman, 2007:2)

Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat mulai berjalan pada tanggal 12 Mei 1947 dengan struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Daerah Istimewa yaitu Sultan Hamid II dan dibantu Badan Pemerintahan Harian (BPH) berjumlah 5 orang, terdiri Johannes Chrisostomus Oevaang Oeray, A. F. Korak, Lim Bak Meng, Muhammad Saleh dan Mansyur Rifa’I yang sebelumnya adalah Nieuwhusjen. Daerah Swapraja yang ada di Kalimantan Barat masing-masing dipimpin oleh Raja atau Sultan dan Neo Swapraja dipimpin oleh Demang.

Tanggal 10 Mei 1948 Belanda mengakui Kalimantan Barat berstatus Daerah Istimewa dengan Pemerintahan tegak berdiri sendiri beserta Dewan Kalimantan Barat melalui Residen Hindia Belanda yang ditanda tangani oleh Hubertus Johannes Van Mook di Pontianak dan mengeluarkan *Besluit Luitenant Gouverneur Generaal* No 161, tanggal 2 Mei 1948 No 8 Staatbald Lembaran Negara 1948/58. Perkembangan Daerah Istimewa Kalimantan Barat tidak terlepas dari peran Sultan Hamid II, karena Sultan Hamid II salah satu pembentuk *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal di Bandung pada tanggal 15-18 Juli 1948 yang berguna untuk memudahkan Negara-negara Otonom dan Republik Indonesia untuk menghadapi perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag – Belanda.

Pasca kependudukan Jepang, masyarakat di Kalimantan Barat pada umumnya mengalami depresi akibat terjadinya pembunuhan massal oleh Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1944. Untuk membangun kembali keadaan sosial masyarakat di Kalimantan Barat di harapkan pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Namun, dalam perjalanan Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat ternyata mendapatkan pertentangan dari sekelompok masyarakat.

Gerakan yang menentang Pemerintahan DIKB ini menganggap bahwa Pemerintahan tersebut merupakan bagian pro Belanda. Gerakan tersebut di lakukan dengan cara demonstrasi di halaman Kebun Sayur *Vorstraat* yang di motori oleh Ibrahim Saleh. Ada tiga faktor utama yang mengharuskan Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibubarkan :

1. DIKB adalah warisan pemerintahan Kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945
2. DIKB adalah pemerintahan Negara Federal yang tidak sesuai dengan semangat Negara Kesatuan
3. DIKB tidak selaras dengan aspirasi perjuangan rakyat Kalimantan Barat (Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, 171 : 1991)

Setelah Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 dari hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag – Belanda, Presiden Soekarno dan Hamengkubuwono IX serta para pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, berusaha mendelegitimasi keberadaan Negara dan Daerah Bagian, termasuk Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Operasi intelijen di bawah Kolonel Angkatan Darat Zulkifli Lubis dan Mayor Angkatan Udara Tjilik Riwut telah menggalang tokoh Dayak J.C Oevaang Oeray yang menjadi salah satu anggota Badan Pemerintah Harian DIKB agar berpaling haluan dari mendukung Negara Serikat (Federalis) menjadi pendukung Negara Kesatuan (Unitaris). (Anshari Dimiyati dkk, 2013:17)

Atas keadaan politik yang tidak menentu, membuat Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat tidak berjalan dengan baik, karena selain tuntutan para demonstrasi untuk membubarkan DIKB, pada tanggal 12 Januari 1950 Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX mengirim sejumlah pasukan Tentara Republik yang dipimpin oleh Letkol (Inf) Sukanda Bratamenggala dengan komandan Kapten (Inf) Johannes Pejoh ke Pontianak untuk mengamankan dan menghancurkan sisa-sisa yang dianggap hasil peninggalan Pemerintahan Belanda seperti arsip dan bangunan – bangunan Belanda di Pontianak.

Sultan Hamid II yang ketika itu berada di Den Haag – Belanda terpaksa meninggalkan pekerjaan untuk menyelesaikan hasil – hasil administrasi Republik Indonesia Serikat karena Sultan Hamid II mendapatkan informasi dari anggota Dewan Kalimantan Barat bahwa Kota Pontianak di duduki oleh Tentara Republik dan menghancurkan bangunan – bangunan yang ada di Pontianak. Pendaratan tersebut sama sekali tidak di koordinasikan terlebih dahulu dengan Sultan Hamid II sebagai Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat.

Minggu ketujuh setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Kerajaan Belanda tersebut, hampir seluruh wilayah Indonesia timbul gerakan menuntut perubahan bentuk Negara Federasi menjadi Negara Kesatuan. Operasi intelijen TNI di bawah koordinasi Letkol Zulkifli Lubis telah berhasil membungkam para tokoh pendukung federasi di sejumlah otonom dan atau Negara Bagian. (Anshari dkk, 2013:71).

Suasana politik di Kalimantan Barat selama berstatus Daerah Istimewa Kalimantan Barat semakin tidak stabil ketika para pendukung Negara Kesatuan asal Kalimantan Barat yang menginginkan DIKB dibubarkan dan menyatukan diri kedalam Negara Kesatuan di antaranya yaitu Alianjang dan Samirin Minhaj telah menyerukan kemerdekaan bagi rakyat daerah Mempawah, Singkawang, Bengkayang dan Sambas yang ketika itu pemerintah sipil *Nedherland Indische Civil Administration* (NICA) melaksanakan pengamanan selama pendudukan Jepang berakhir di Kalimantan Barat tahun 1945. Mereka juga menyerukan untuk mendukung organisasi yang dipimpin oleh Alianjang yaitu Barisan Pemberontakan Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB).

Upaya yang juga dilakukan Dr. Soedarso selaku ketua organisasi Gabungan Persatuan Indonesia (GAPI) di Pontianak untuk menuntut pembubaran Pemerintahan DIKB adalah menyerukan rakyat Pontianak untuk bergabung kedalam organisasi GAPI tersebut. Pada tanggal 18 Mei 1947 GAPI mengadakan konferensi yang dihadiri oleh utusan seluruh daerah Kalimantan Barat untuk membahas masalah DIKB. Hasil konferensi yang telah dilakukan antara lain :

1. Menolak Borneo Statement yang diresmikan tanggal 12 Mei 1947
2. Kalimantan Barat adalah bagian dari Republik Indonesia
3. Mendesak supaya bendera Merah Putih boleh dikibarkan di seluruh pelosok Kalimantan Barat (Pemda Kalbar, 200 : 1991)

Para pendukung Negara Kesatuan (Republikan) yang telah melakukan aksi demonstrasi dan pertemuan dalam konferensi itu tidak pernah melakukan koordinasi dan mediasi terhadap Dewan Pemerintah Harian (BPH) dan Sultan Hamid II selaku Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat, mereka yang mendukung Kalimantan Barat menyatu kedalam Negara Kesatuan itu mempunyai visi dan misi yang berbeda. Mereka tidak ingin pemerintah yang telah disepakati para Raja atau Sultan yang ada di Kalimantan Barat pada tanggal 22 Oktober 1946 yang diakui oleh Belanda tersebut bisa menguasai kembali daerah Kalimantan Barat seperti kekuasaan Pendudukan Jepang yang telah pernah mengancam kehidupan rakyat Kalimantan Barat pada tahun 1942 – 1945.

Setelah Tentara Republik menduduki seluruh daerah kekuasaan Daerah Istimewa Kalimantan Barat, pada bulan April 1950 J.C Oevaang Oeray selaku anggota Dewan Pemerintah Harian (BPH) mengeluarkan berita keputusan salah satunya mendukung pembentukan dan perubahan bentuk Negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan dengan syarat bahwa ada otonomi seluas mungkin

diberikan kepada Provinsi-provinsi, serta jaminan bahwa wilayah Kalimantan Barat yang kini ada tidak dikurangi. (Syafaruddin, 2012:91)

Sikap politik J.C Oevaang Oeray yang tersudut akibat terjadi desakan dari para demonstrasi, pendudukan Tentara Republik oleh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan intervensi Intelijen Republik oleh Letkol Zulkifli Lubis memperkuat penggabungan wilayah Kalimantan Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Republik Indonesia Serikat (RIS) menyetujui integrasi Kalimantan Barat kedalam Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah RIS No. 21/1950 tanggal 4 Agustus 1950. Akhirnya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menjadi wadah bagi negara – negara otonom seperti Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Tahun 1951, keluarlah surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/10 yang mencakup segala ketentuan tentang pembagian secara administratif daerah Kalimantan Barat yang dahulunya dikenal dengan nama Daerah Istimewa Kalimantan Barat kedalam 6 daerah Kabupaten administratif yakni Pontianak, Ketapang, Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan sebuah daerah Kota Administratif Pontianak. (Lontaan, 1975:261)

Kenyataan dalam sejarah pemerintahan Kalimantan Barat bahwa Kalimantan Barat dahulunya merupakan sebuah daerah federasi dari sebuah Negara Republik Indonesia Serikat yang mendapat status Daerah Istimewa karena di pandang dari sudut asal usul sejarah dan mempunyai daerah pemerintahan

Swapraja yang tegak berdiri sendiri yang terbanyak. Sebuah negara yang di pimpin oleh seorang Sultan Pontianak yaitu Sultan Syarif Hamid Al-Kadri mendapat pengakuan dari negara – negara lain dan juga pemerintah Belanda di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van Mook.

Pengaruh dari figur Sultan Hamid II seorang pemimpin Daerah Federasi Kalimantan Barat serta ketua delegasi Negara – negara Federasi (BFO) dalam membebaskan Republik Indonesia dari Kerajaan Belanda didalam Konferensi Meja Bundar (KMB) sehingga Republik Indonesia mendapatkan hak kemerdekaan secara hukum pada 27 Oktober 1949 merupakan suatu kemuliaan yang dalam. Tetapi hasil yang di dapatkan oleh Sultan Hamid II selaku menteri RIS dan Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah bahwa Republik Indonesia menyatakan Sultan Hamid II bersalah dalam kasus Westerling dengan hukuman kurungan 10 tahun penjara, dan Daerah Istimewa Kalimantan Barat di alih fungsikan menjadi sebuah Provinsi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) harus ikut tenggelam bersama pemimpin – pemimpinya pada saat itu ditahun 1950.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas permasalahan umum yang akan dikaji oleh peneliti adalah “ Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (1946 – 1950)”. Sedangkan untuk menghindari luasnya pembahasan permasalahan yang akan dikaji dan memberikan arahan yang jelas, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut :



1. Bagaimana terbentuknya Daerah Istimewa Kalimantan Barat ?
2. Bagaimana bentuk sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan barat?
3. Bagaimana Akhir dari Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara deskriptif mengenai Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tahun 1946 – 1950. Berdasarkan dari permasalahan yang dikemukakan maka peneliti mengemukakan beberapa tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian sebagai berikut untuk :

1. Mengetahui sejarah terbentuknya Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tahun 1946.
2. Mengetahui bentuk sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan barat.
3. Mengetahui akhir dari Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan masuk kedalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut ;

- a. Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat tahun 1946 – 1950.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bentuk sistem Pemerintahan Daerah istimewa Kalimantan barat
- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui proses Daerah Istimewa Kalimantan Barat tergabung kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian sebagai berikut :

### a. Masyarakat Kalimantan Barat

Diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat Kalimantan Barat terhadap sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat sebagai kejadian masa lalu yang dialami di Kalimantan Barat pada masa itu.

### b. Program Studi Pendidikan Sejarah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi kepada mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah terutama yang berkaitan dengan sejarah daerah Istimewa Kalimantan Barat.

### c. Peneliti Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terutama tentang sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Dengan demikian, peneliti yang juga sebagai generasi muda Kalimantan Barat mendapatkan pemahaman akan pentingnya sebuah sejarah yang telah dialami di daerah Kalimantan Barat. Selain itu dengan adanya penulisan ini dapat melatih peneliti dalam membuat karya tulis ilmiah terutama penulisan sejarah lokal.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembatasan ruang lingkup penelitian perlu diadakan agar tetap berada pada pokok pembahasan masalah yang akan diteliti dan tetap pada pengertian yang dimaksud dalam judul. Ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

#### **1. Ruang lingkup wilayah / Spasial**

Ruang lingkup wilayah atau spasial adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan suatu daerah atau wilayah tertentu tempat peristiwa yang akan diteliti terjadi. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat di Provinsi Kalimantan Barat.

#### **2. Ruang lingkup waktu / Temporal**

Ruang lingkup waktu atau temporal adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian seperti peristiwa yang dikisahkan. Penelitian ini dimulai pada saat terbentuknya Daerah Istimewa Kalimantan Barat tanggal 22 Oktober 1946 sampai tergabungnya Daerah Istimewa Kalimantan Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950.

### **F. Tinjauan Pustaka yang Relevan**

Tinjauan pustaka yang relevan ini dilakukan adalah sebagai kajian teoritis, agar dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam memilih teori-teori yang relevan dalam penelitian. Berdasarkan dari hasil kajian sumber tertulis baik berupa buku, skripsi, artikel dan

jurnal yang isinya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian ini.

Buku yang ditulis oleh Anshari Dimiyati, Nur Iskandar dan Turiman Facturrahman Nur yang berjudul “Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara “Elang Rajawali – Garuda Pancasila” , memberikan penjelasan mengenai profil dan perjalanan hidup seorang pendiri sekaligus kepala pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat yaitu Sultan Hamid II. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai kronologi sebuah pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diperjuangkan di kota Den Haag – Belanda. Republik Indonesia Serikat merupakan sebuah pemerintahan berbentuk Federasi yang mewadahi beberapa Negara Bagian seperti Negara Republik Indonesia yang berpusat di kota Yogyakarta dan Daerah Bagian seperti Daerah Istimewa Kalimantan Barat yang berpusat di kota Pontianak. Semua pemerintahan dibawah bendera federasi Republik Indonesia Serikat itu kelak termaktub kedalam konstitusi Republik Indonesia Serikat yang sah dan berlandaskan hukum. Permainan politik dalam negeri membuat eksistensi pemerintahan RIS itu kemudian dihilangkan akibat keputusan – keputusan yang dibuat oleh Ir. Soekarno dan Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, hal ini membuat negara – negara otonom seperti Daerah Istimewa Kalimantan barat di hapuskan oleh Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Buku ini relevan dengan apa yang akan dibahas oleh peneliti karena mencakup mengenai sejarah pemerintahan pada tahun 1946 sampai tahun 1950.

Buku yang ditulis oleh Aju dan Syafaruddin Usman MHD yang berjudul “J.C. Oevaang Oeray, Langkah dan Perjuangannya”, memberikan penjelasan

mengenai peranan seorang tokoh yang bernama Johannes Chrisostomus Oevaang Oeray dalam pemerintahan di Kalimantan Barat. Beliau adalah seorang putra daerah Kalimantan Barat yang ikut serta dalam pemerintahan DIKB pada tahun 1946 sampai tahun 1950 yang menjadi anggota Dewan Pemerintah Harian DIKB. Peranan politik J.C Oevaang Oeray berpengaruh besar dalam pemerintahan sehingga harus menghadapi perlawanan sekelompok orang di Kalimantan Barat yang pro terhadap Republik Indonesia. Perlawanan dari sekelompok orang yang menuntut penggabungan kedalam Republik Indonesia ini kemudian J.C Oevaang Oeraay harus menerima keadaan ini dan menyatakan bersedia bergabung kedalam Negara Kesatuan republik Indonesia tahun 1950.

Buku yang ditulis oleh J.U Lontaan yang berjudul “ Sejarah Hukum dan Adat Istiadat Kalimantan Barat”, memberikan penjelasan mengenai masalah sejarah hukum adat suku Dayak dari masa ke masa, selain itu juga membahas mengenai sejarah Kerajaan – kerajaan yang ada di Kalimantan Barat, sejarah pemerintahan berbentuk federasi Daerah Istimewa Kalimantan Barat beserta sejarah pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Pembahasan mengenai pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat ini mencakup masalah pembentukan sebuah pemerintahan hasil gabungan semua Kerajaan yang ada di Kalimantan Barat karena menyadari akibat terjadinya penjajahan Jepang pada tahun 1942 – 1945 sehingga terjadi kekosongan pemerintah di setiap Kerajaan di Kalimantan Barat. Kemudian pembahasan mengenai masalah hukum yang mengesahkan sebuah pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan

pembahasan mengenai masalah tergabungnya Kalimantan Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 1950.

Sarimin Minhad dalam karyanya yang berjudul “Setetes Air di Padang Pasir” meniliskan tentang perlawanan rakyat Kalimantan Barat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945. Dalam karya Samirin Minhad ini tertulis tentang perjuangan rakyat Sambas terutama peristiwa berdarah 27 Oktober yang menewaskan Tabrani Ahmad di halaman Istana Kesultanan Sambas. Selain itu buku ini juga membahas mengenai masalah perlawanan rakyat yang menuntut dibubarkannya pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat yang dianggap sebagai pemerintahan boneka Belanda yang pada saat itu *Netherland Indische Civil Administration* (NICA) bersama sekutu menduduki kota sambas untuk mengamankan situasi pada saat berakhirnya pendudukan Jepang. Alianjang dan organisasi Barisan Pemberontakan Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB) juga ikut terlibat dalam aksi pertentangan pemerintahan ini. Mereka menuntut daerah Kalimantan Barat agar segera bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku yang ditulis oleh Dr. Deliar Noer berjudul “Muhammad Hatta, Hati Nurani Bangsa”, memberikan penjelasan tentang biografi politik Muhammad Hatta selaku bapak bangsa Indonesia yang banyak berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan membangun sebuah pemerintahan baru di Indonesia. Selain itu buku ini juga membahas tentang nasib pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang berbentuk Federasi karena hanya berjalan tidak lama seiring perjuangan untuk melepaskan diri dari Belanda di Konferensi Meja Bundar (KMB) pada

tahun 1949 di Den Haag – Belanda. Muhammad Hatta pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri RIS dan Sultan Hamid II menjabat sebagai Ketua delegasi *Beejenkomst Voor Federaal Overleg* (BFO) yaitu sebuah perhimpunan Negara – negara otonom diluar Negara Republik Indonesia yang juga bersama – sama di KMB untuk membentuk sebuah ikatan federasi di Indonesia.

Buku yang ditulis oleh Ide Anak Agung Gde Agung yang berjudul “Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat”, memberikan penjelasan mengenai masalah tentang perjalanan negara – negara bagian pada masa Republik Indonesia Serikat 1949. Sebuah negara yang terbentuk dengan sistem federasi yang diperkenalkan oleh seluruh dunia lewat Konferensi Meja Bundar di Den Haag – Belanda ini diakui oleh dunia pada saat itu. Peranan dari Kepala Negara Bagian Negara Indonesia Timur ini memberikan penjelasan mengenai status federasi yang dikehendaki oleh dunia, bahwa konsep federasi sangatlah cocok untuk Indonesia karena dilihat dari daerah yang banyak akan pulau dan keberagaman akan budaya yang ada di Indonesia.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *penelitian metode sejarah*. Daliman ( 2012: 27) “ mengatakan metode berarti suatu cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai sesuatu tujuan secara efektif dan efisien, berarti dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur, atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah”.

Sjamsuddin (2012:12) “ mengatakan metode sejarah adalah bagaimana mengetahui sejarah, sedangkan metodologi adalah mengetahui bagaimana sejarah”. Sjamsuddin (2012:13)” mengatakan metode adalah jalan, cara, prosedur bagaimana mengetahui (*how to know*) dan metodologi adalah ilmu tentang metode, tahu bagaimana mengetahui (*Know how to know*) “.

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia (1997:139). Metode merupakan cara yang tersusun dan teratur, untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan. Dilihat dari asal usul katanya metode berasal dari kata Yunani yaitu *methode* yang berarti cara. Metode juga diartikan sebagai suatu prosedur untuk mengerjakan suatu susunan atau sistem yang teratur (Helius Sjamsudin, 2007:12). Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu prosedur yang teratur dan terencana untuk berbuat sesuatu.

Metode penelitian sejarah merupakan proses meneliti dan menganalisis secara sistematis dan kritis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan melalui rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 2008: 39). Hal ini dimaksudkan untuk menilai secara kritis keseluruhan hasil penelitian dan penyelidikan tersebut. Hasilnya kemudian akan menjadi pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta proses di masa depan. Ia harus pasti bahwa rekaman-rekamannya sungguh-sungguh berasal dari masa lampau dan memang benar-benar apa yang tampaknya demikian dan bahwa imajinasinya ditunjukkan terhadap kreasi. Sesuai dengan langkah-langkah yang diambil dalam keseluruhan prosedur, metode sejarah biasanya dibagi empat kelompok kegiatan, yakni :



## 1. Heuristik

Menurut Daliman (2012:28) heuristik adalah “kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah”. Menurut Aam Abdillah (2012:29) mendefenisikan heuristik adalah “ proses mencari untuk menemukan sumber-sumber”. Dapat disimpulkan bahwa heuristik adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian untuk mengungkap kejadian atau peristiwa dimasa lampau. Heuristik merupakan kegiatan awal dalam penelitian sejarah dimana peneliti berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (1946 – 1950).

Sumber yang digunakan peneliti adalah sumber lisan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang mengerti dengan peristiwa tersebut atau permasalahan yang akan diteliti. Selain menggunakan sumber lisan peneliti juga menggunakan sumber literatur dokumen, arsip dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Jika dilihat dari bentuknya maka sumber sejarah terdiri dari dua sumber, yaitu :

### a. Sumber Primer

Menurut Gottschalk (2008:43) mendefenisikan sumber primer adalah “kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra yang lain, atau dengan alat mekanis”. Sedangkan menurut Aam Abdillah (2012:97) menyatakan sumber primer adalah “kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindra yang lain, atau dengan alat mekanis” ”. Dari pengertian tersebut

dapat disimpulkan bahwa sumber primer adalah sumber utama dari kesaksian seseorang dengan mata kepala sendiri.

Sumber primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu melalui sejarah lisan (*Oral History*) terhadap saksi mata sejarah yang masih hidup atau dengan menggunakan pendekatan lisan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai masyarakat Kalimantan Barat yang menjadi saksi hidup pada masa pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat atau tokoh masyarakat yang dianggap mengerti terhadap masalah yang akan diteliti. Selain itu peneliti juga menggunakan berupa photo dan tulisan yang ditulis oleh pelaku maupun saksi mata dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah Baroamas Massoeka Djabang Djanting yang pada saat itu beliau menjadi anggota Dewan Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat sekaligus menjadi kerabat dekat Sultan Hamid II selaku Kepala DIKB.

**b. Sumber Sekunder**

Menurut Gottschalk (2008:43) mendefenisikan sumber skunder adalah “kesaksian siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan”. Sedangkan secara singkat menurut Kuntowijoyo (1994:96) mengatakan “sumber sekunder adalah apabila disampaikan bukan saksi mata”.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sumber sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui bukan dari saksi mata atau sumber kedua yang merujuk kepada sumber primer dari sebuah kejadian

atau peristiwa sejarah yang akan diteliti. Untuk pengumpulan data dari sumber sekunder dalam penelitian ini adalah mencari dokumen-dokumen atau data yang tersimpan di arsip daerah Kalimantan Barat dan Yayasan Sultan Hamid II.

## 2. Verifikasi

Menurut Daliman (2012:28) mengemukakan verifikasi adalah “meneliti apa sumber-sumber itu sejati, baik bentuk maupun isinya”. Sedangkan menurut Taupan dkk (1995:96) mengemukakan verifikasi adalah “tahapan pemeriksaan dan pengujian terhadap laporan sejarah”. Kemudian menurut Suhartono W. Pranoto (2010:35) mengatakan verifikasi adalah “upaya untuk mendapatkan otensitas dan kredibilitas sumber”

Didalam pengertian yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan verifikasi adalah sebagai pengujian tahapan kebenaran dan kemampuan untuk dipercaya sebuah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Bahan-bahan maupun informasi yang telah dikumpulkan ketika melakukan penelitian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap kebenaran yang didapat sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang objektif.

Verifikasi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu verifikasi eksternal dan verifikasi internal. Menurut Helius Sjamsuddin (2012:104) mengartikan bahwa verifikasi eksternal ialah “cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah”. Kemudian Suhartono Pranoto (2010:36) mendefinisikan bahwa verifikasi eksternal adalah “usaha mendapatkan autensitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap

suatu sumber”. Selanjutnya Sugeng Priyadi (2012:62) berpendapat bahwa verifikasi eksternal adalah “mencari otentisitas atau keaslian (keotentikan) sumber”.

Demikian dapat disimpulkan verifikasi eksternal adalah pengujian terhadap keaslian sumber sejarah yang diperoleh dan mengacu kepada isi, waktu serta ukuran yang ada pada sumber sejarah tersebut. Jika dilihat dari pengertian tersebut maka sumber-sumber yang harus didapatkan peneliti adalah sumber yang autensitas, berkualitas serta mengikat permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu maka peneliti akan menggunakan sumber buku-buku yang sezaman dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu agar sumber-sumber yang didapat itu berimbang maka peneliti juga mendapatkan sumber-sumber dari masyarakat maupun tokoh masyarakat yang mengerti dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka kritik ekstern dilakukan terlebih dahulu melalui kegiatan memilih keaslian sumber untuk menentukan bahwa sumber tersebut merupakan sumber yang benar-benar dibutuhkan dan merupakan sumber asli.

Setelah melakukan verifikasi eksternal maka peneliti akan melakukan verifikasi internal. Sugeng Priyadi (2012:62) menyatakan bahwa verifikasi internal adalah “melakukan penilaian apakah sumber itu memiliki kredibilitas (kebiasaan untuk dipercaya) atau tidak”. Sedangkan menurut Suhartono W. Pranoto (2010:37) mengemukakan bahwa verifikasi internal adalah “kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber”. Kemudian Helius Sjamsuddin (2012: 112) berpendapat bahwa verifikasi internal adalah ”menekankan aspek dalam

yaitu isi dari sumber (kesaksian)”. Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan verifikasi internal adalah pengujian tentang suatu sumber atau data sejarah yang didapatkan agar dapat dipercaya. Verifikasi internal digunakan untuk mengetahui autensitas isi dari sumber-sumber yang didapatkan peneliti dalam rangka menghasilkan historiografi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu verifikasi internal dilakukan untuk mengetahui kebenaran isi sumber, data-data yang berkaitan dengan Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat, keaslian data serta keutuhannya sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan kronologis dengan peristiwa yang akan dikaji. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kebenaran sumber yang berhubungan atau bertentangan satu sama lain. Peneliti akan melakukan perbandingan terhadap dokumen atau sumber tertulis yang sebagian besar merupakan sumber sekunder, tetapi diharapkan masih mencari kedekatan yang benar. Tujuan akhir dari melakukan verifikasi eksternal maupun verifikasi internal adalah menetapkan otensitas dari sumber yang diuji untuk menghasilkan fakta sejarah. Fakta yang telah didapatkan peneliti dari kegiatan verifikasi akan digunakan dalam pembahasan yang akan diteliti yaitu mnyangkut tentang Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (1946 – 1950).

### **3. Interpretasi**

Menerut Daliman (2012:81) mengatakan interpretasi adalah “menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah

dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau”. Sedangkan menurut Suhartono W. Pranoto (2010:54) mengartikan interpretasi adalah “tafsiran terhadap cerita sejarah dan fakta yang telah dikumpulkan”. Dengan demikian dapat disimpulkan interpretasi adalah proses penafsiran terhadap sumber sejarah yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Interpretasi dilakukan ketika data yang dibutuhkan terbukti kebenarannya. Dalam proses ini maka peneliti melakukan penafsiran dan pemaknaan dari fakta-fakta yang didapatkan sehingga menjadi suatu kesatuan yang logis dan rasional serta memiliki makna sehingga dapat digunakan dalam penulisan sejarah yang baik.

Didalam proses interpretasi terbagi menjadi dua langkah yaitu analitis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan data atau sumber yang telah dipilih atau diseleksi, sedangkan sintesis adalah menyatukan atau menggabungkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya untuk menggabungkan sebab akibat atau hubungan yang saling menguatkan dan relevan.

Setelah sumber sejarah yang dikumpulkan dan diverifikasi, maka sumber yang ada ditafsirkan oleh peneliti dengan tujuan mampu mengungkapkan makna dan mendapatkan data yang objektif sehingga menghasilkan penulisan sejarah yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat sambas. Sumber yang akan ditafsirkan oleh peneliti adalah sumber-sumber yang berkaitan dengan Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (1946 – 1950).

#### 4. Historiografi

Menurut Daliman (2012:29) mengatakan historiografi adalah “penyajian hasil yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah sejarah”. Sedangkan menurut Nugroho Noto Susanto (dalam Suparman, 1971:13) mengatakan historiografi adalah “tahap akhir dari kegiatan penelitian sejarah yang menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk karya sejarah”. Kemudian Helius Sjamsuddin (2012:121) menyatakan bahwa historiografi adalah “hasil suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian atau penemuannya dan suatu penulisan yang utuh”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa historiografi adalah suatu proses merangkai fakta dan menyajikannya dalam bentuk tulisan sejarah sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan hasil penelitian dengan orang lain.

Penulisan Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat tahun 1946 – 1950 di Kalimantan Barat adalah sebagai bentuk alat komunikasi yang disampaikan peneliti dari apa yang didapat selama melakukan penelitian. Penulisan sejarah harus objektif dan tidak mengandung subjektivitas dalam penulisan, agar tulisan yang dihasilkan mengandung kebenaran sejarah. Selain menggunakan sumber sejarah yang valid dalam penulisan sejarah juga diperlukan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca sehingga hasil penelitian benar-benar dapat disampaikan kepada pembaca.

## H. Sistematika Penulisan

Didalam memudahkan pemahaman penelitian, maka peneliti akan memberikan gambaran tentang garis besar penelitian, dalam rangka menyusun sebuah cerita sejarah yang objektif, sistematis, kronologis dan menarik. Adapun susunan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian. Pada bab ini memberikan gambaran awal tentang permasalahan yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Bab II: Landasan teori yang berisikan sumber-sumber buku sebagai bahan rujukan atau pembandingan utama yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diharapkan landasan teori ini dapat menjadi acuan untuk membantu atau mendukung untuk menjelaskan temuan-temuan dalam penelitian.

Bab III: Metodologi penelitian, yang berisi kerangka arahan untuk melakukan penelitian. Pada bab ini memberikan gambaran metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yang terkait dengan penelitian historis.

Bab IV: menjawab pembahasan tentang terbentuknya pemerintahan dan sistem pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat serta terintegrasi kedalam Negara Kesatuann Republik Indonesia tahun 1950. Dipaparkan mengenai hasil penelitian berupa informasi dan data yang sudah dilakukan.



Dalam hal ini memaparkan hasil penelitian dalam uraian deskriptif agar semua keterangan yang diperoleh dapat dijalankan secara rinci serta memberi jawaban atas batasan masalah yang sudah ada.

Bab V: Kesimpulan dan Saran, kesimpulan bersifat historis yang berisikan kesimpulan tentang nilai-nilai positif yang dapat diambil dari nilai tersebut, sejarah lokal dan pemahaman sejarah bangsa. Sedangkan saran adalah unsur yang dapat berguna untuk menyempurnakan penelitian ini.

